

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan Misi 3 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *“Meningkatkan kinerja Pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik”* dan pencapaian tujuan pelayanan dasar Inspektorat, *“Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat”*, maka Inspektorat melakukan telaahan/kajian terhadap Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) yang dianggap mempunyai keterkaitan misi dengan Inspektorat.

Misi Kementerian PAN dan RB yang berkaitan dengan tugas pelayanan dasar Inspektorat diantaranya adalah: *a) Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur; b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik; c) Meningkatkan koordinasi pengawasan; d) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan; dan e) Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.*

Pada tabel 3.1. di halaman berikut dikemukakan permasalahan pelayanan Inspektorat berkaitan dengan sasaran Renstra Kementerian PAN dan RB.

Tabel 3.1.  
Permasalahan pelayanan Inspektorat berdasarkan sasaran Renstra  
Kementerian PAN & RB

No	Tujuan/Sasaran Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Pelayanan publik yang prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan belum tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum lengkapnya prosedur operasi baku (Standard Operating Procedure)</li> <li>• Rendahnya mutu pelayanan publik (tuntutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berlakunya Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menekankan harus dibentuk ULP &amp; LPSE di setiap</li> </ul>

			masyarakat pelayanan yang prima) atas publik	<p>Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan kewajiban OPD menyusun SOP setiap kegiatan pelayanan</li> <li>• Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>• Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah</li> <li>• Permen PAN Nomor Per/20/M.Pan/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik</li> </ul>
2.	Mewujudkan reformasi birokrasi aparatur negara	Masih maraknya praktek KKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas</li> <li>• Kurangnya komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap kebijakan pendayagunaan aparatur negara</li> </ul>	Diterbitkannya <i>Grand Design &amp; Road Map</i> Reformasi Birokrasi oleh Kementerrain PAN & RB
3.	Meningkatkan koordinasi pengawasan	Inkonsistensi pelaksanaan jadwal dan kebijakan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkonsistensi dan dukungan dalam penerapan kebijakan</li> <li>• Lemahnya pelaksanaan koordinasi</li> <li>• Belum optimalnya perumusan kebijakan</li> </ul>	Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan Itjen Kementerian dan Kebijakan Pengawasan
4.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan	mind-set (pola pikir) dan cultural-set (pola budaya) dalam melayani masyarakat masih berperilaku koruptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras)</li> </ul>	
5.	<i>Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien</i>	Kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan pendayagunaan aparatur negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai penerapan Akuntabilitas</li> </ul>	

			Kinerja Instansi Pemerintah • Adanya intervensi politik dalam penetapan kelembagaan pemerintah, kecenderungan instansi pemerintah untuk memperbesar organisasi, dan penataan organisasi cenderung hanya untuk penempatan orang/pegawai yang tidak tertampung.	
--	--	--	--	--

### 3.2. Tujuan Dan Sasaran Inspektorat

Visi Inspektorat Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari misi Jawa Barat, terutama misi ketiga: *"Meningkatkan kinerja Pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik"*, Inspektorat Provinsi Jawa Barat menetapkan visi sebagai berikut:

***"Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang Profesional untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"***

Untuk mendukung visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Provinsi Jawa Barat menetapkan misi yang berdasarkan pada sasaran dari misi ketiga Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan internal secara profesional terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatkan peran pembinaan (konseling) aparat pengawasan internal dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
3. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme aparatur dan kapasitas pengawas internal yang didukung oleh sistem informasi pengawasan yang akurat dan optimal.

---

Selaras dengan Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Barat di atas, serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama melaksanakan “*misi kelima*” Provinsi Jawa Barat, “*Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi*”, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan fungsional oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan, ditetapkan 5 (lima) tujuan Inspektorat yang merupakan tujuan ke luar organisasi dan tujuan ke dalam organisasi, yaitu:

- a. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
- c. Meningkatnya mutu dan akuntabilitas kinerja OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- d. Meningkatnya sistem pengendalian intern, transparansi, dan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- e. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam

---

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah;
- b. Meningkatnya kualitas administrasi umum pemerintahan;
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- e. Meningkatnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada OPD Provinsi Jawa Barat;
- f. Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat;
- g. Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

#### **3.3.1. Rencana Program**

Program-program pengawasan dan pembinaan menyesuaikan dengan Program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan,  
Bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel dengan sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat, mendorong terciptanya kualitas aparat pemerintah yang profesional dan bersih, dan meningkatkan koordinasi - sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.

- 
- b. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah,  
Bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel dengan sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat.
- c. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur,  
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran meningkatkan kualitas *skill*, *knowledge* dan *attitude* aparatur penawasan.
- d. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur,  
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan aparatur penawasan.
- e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,  
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran.
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,  
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan akan alat-alat penunjang kegiatan yang representatif.
- g. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur,  
Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai.

- 
- h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

**3.3.2. Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat dengan sasaran sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Inspektorat yang akuntabel.****Rencana Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran dari program pengawasan dan pembinaan, yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Inspektorat yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. *Pelaksanaan Reviu, Pemeriksaan, dan Evaluasi pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota*, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan kontribusi dan partisipasi fungsi pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah dilaksanakan pada seluruh OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
- b. *Kegiatan Pengananan Kasus Pengaduan Masyarakat*, yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, lokasi kegiatan dilaksanakan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat
- c. *Kegiatan Pemutakhiran Data dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat*, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat, kegiatan dilaksanakan pada seluruh OPD Provinsi

---

dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

- d. *Kegiatan Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan*, bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan, dilaksanakan pada seluruh OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
- e. *Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan*
- f. *Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Jawa Barat*

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertujuan untuk mendorong terciptanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih serta bebas korupsi, lokasi kegiatan dilaksanakan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

- g. *Kegiatan Desk Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat*, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan pada seluruh OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
- h. *Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan OPD Provinsi (EPPD)*, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat terutama berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan pada seluruh OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa



---

Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.

- i. *Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan*, bertujuan untuk meningkatkan kualitas skill, knowledge dan attitude aparatur pengawasan, dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
  - j. *Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat*, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur pengawasan, dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
  - k. *Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat*, bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran, dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
  - l. *Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan alat-alat penunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan yang representatif, dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
  - m. *Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat*, bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif melalui sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai, dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Inspektorat Provinsi Jawa Barat*, bertujuan untuk meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Inspektorat yang

akuntabel, dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.  
Dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.